

Faktor Kunci Sukses Meningkatkan Daya Saing Jawa Tengah Sebagai Daerah Tujuan Investasi

MG Westri Kekalih Susilowati, SE.ME.
FEB Unika Soegijapranata Semarang
Email: westrie@unika.ac.id

Abstrak

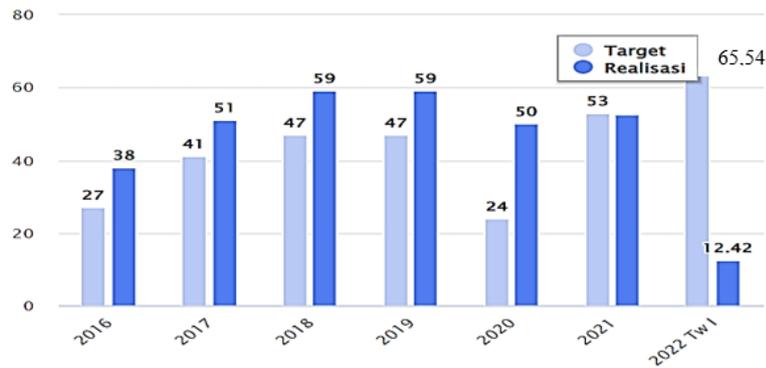
Peran sektor swasta semakin dibutuhkan dalam perekonomian dalam bentuk investasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi karena pemerintah memiliki keterbatasan fiskal dalam membiayai berbagai proyek. Terlebih dalam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Peran swasta dalam perekonomian biasanya dikaitkan dengan kegiatan investasi yang mensyaratkan adanya iklim investasi yang kondusif serta risiko politik yang rendah. Namun demikian, untuk menjadi lebih berdaya saing sebagai daerah tujuan investasi daerah harus mampu menyediakan “lebih” dari iklim investasi yang kondusif dan risiko politik yang rendah. Daerah harus mampu menemukan faktor kunci sukses untuk lebih berdaya saing. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci sukses meningkatkan daya saing Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi. Kajian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan responden dan narasumber yang kompeten dan mencakup semua pemangku kepentingan investasi. Penelitian ini merumuskan kunci sukses menaikkan daya saing Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi dalam syarat perlu (*necessary condition*) dan syarat cukup (*sufficient condition*). Syarat perlu meliputi iklim investasi yang kondusif. Sedangkan syarat perlu meliputi jaminan ketersediaan lahan, ketersediaan tenaga kerja, Jaminan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang pro investasi, dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang memadai.

Kata kunci: Kunci sukses, pro investasi, Jawa Tengah, daya saing.

1. Pendahuluan

Peran sektor swasta semakin dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi karena pemerintah memiliki keterbatasan fiskal dalam membiayai berbagai proyek. Pada sisi yang lain, kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan beragam. Terlebih dalam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), peran swasta dalam bentuk investasi sangat diharapkan. Bahkan, investasi dapat dikatakan sebagai mesin utama demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia pasca pandemi. Peran swasta dalam perekonomian biasanya dikaitkan dengan kegiatan investasi yang mensyaratkan adanya iklim investasi yang kondusif. Mengenai iklim investasi yang kondusif tersebut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa arus investasi pada suatu negara maupun daerah sangat ditentukan oleh kondisi kelembagaan serta demokrasi atau politik daerah tujuan investasi (Harms dan Ursprung, 2002); Jensen, 2003; dan Busse dan Hefeker, 2007). Indonesia berada di peringkat 73 di antara 190 ekonomi dalam kemudahan berbisnis, menurut peringkat tahunan Bank Dunia terbaru.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi tolok ukur keberhasilan investasi di Indonesia. Kebijakan regionalisasi investasi di Jawa Tengah tampaknya memiliki dampak positif pada perkembangan investasi. Dengan regionalisasi tersebut perencanaan infrastruktur menjadi lebih terarah sehingga iklim investasi menjadi lebih kondusif. Perkembangan investasi di Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Total investasi pada tahun 2020, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp50,24 Triliun, 202% di atas target yang ditetapkan Rp24,89 Triliun. Namun, pada tahun 2021 capaian realisasi investasi di Jawa Tengah lebih rendah dari angka yang ditargetkan yakni Rp52,7 Triliun dari target Rp53,53 Triliun. Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, capaian realisasi investasi di Jawa Tengah sebesar Rp12,42 Triliun. Bertitik tolak dari data perkembangan investasi ini, maka investasi di Jawa Tengah perlu didorong lebih kuat sehingga minimal mencapai target pada akhir tahun 2022.



Gambar 1 Perkembangan Nilai Investasi Provinsi Jawa tengah
Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendorong realisasi investasi tersebut, provinsi Jawa Tengah perlu menerapkan konsep pemasaran daerah (*marketing places*), yakni upaya untuk mengkomunikasikan atau mempromosikan potensi daerah kepada investor. Namun demikian, keputusan investasi tetap merupakan keputusan rasional investor yang diasumsikan memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan. Analisis biaya dan manfaat merupakan hal yang sangat mendasar dalam keputusan investasi. Kondisi biaya dan manfaat dari investasi dipengaruhi oleh iklim investasi secara keseluruhan baik faktor ekonomi, kelembagaan dan risiko politik. Beberapa hal yang sering muncul dalam diskusi antara lain masalah *clean and clear*, kemudahan perizinan, jaminan keamanan maupun komitmen politik pemerintah setempat.

Komitmen politik pemerintah yang pro investasi terdeklarasi dalam slogan “Jawa Tengah Ladang Investasi tahun 2025”. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena akan memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi, menjadikan Jawa Tengah sebagai ladang investasi serta mendorong realisasi investasi di Jawa Tengah.

2. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan penanaman modal di Jawa Tengah. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kelembagaan dan risiko politik

investasi di Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari sumber-sumber data resmi seperti badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa tengah. Data primer dikumpulkan dengan kuesioner (sebanyak 30 kuesioner didistribusikan namun yang kembali dan dinyatakan valid hanya 21 kuesioner) dan wawancara. Data yang dikumpulkan dengan kuesioner mencakup beberapa indikator iklim investasi seperti kondisi keamanan dan stabilitas politik, kondisi ekonomi dan infrastruktur, peluang pasar, prosen perizinan, dan pelayanan aparat. Sedangkan data yang dikumpulkan dengan wawancara mencakup pandangan investor terhadap faktor risiko politik, komitmen pemerintah, faktor kunci sukses permasalahan mendasar, dan harapan investor akan kebijakan pemerintah. Sebagai narasumber untuk diwawancarai secara mendalam investor PMA dan PMDN, KADIN, HIPMI, dan APINDO.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Penanaman Modal Di Jawa Tengah

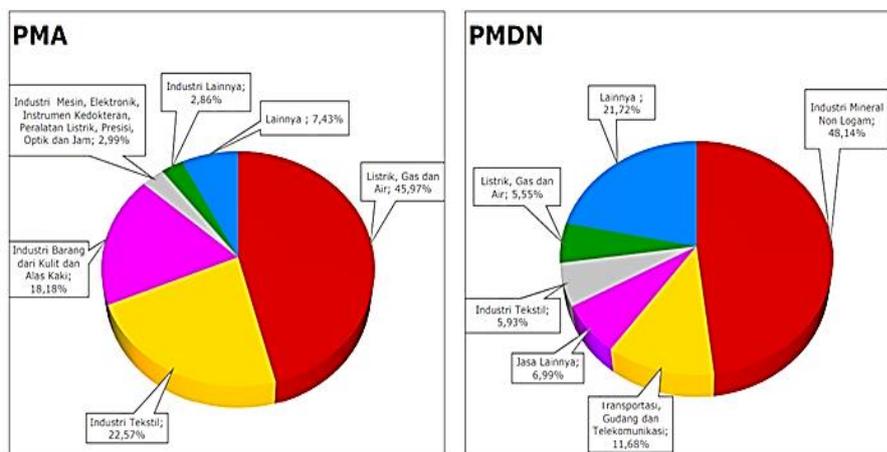
Investasi oleh sektor swasta sebagai mesin penggerak perekonomian sangat diharapkan kehadirannya. Terutama pada masa pemulihan ekonomi nasional saat ini, yakni ketika sektor pemerintah mengalami defisit yang semakin besar. Dengan kehadiran investasi, diharapkan kapasitas produksi nasional kembali meningkat sehingga pengangguran kembali terserap ketersediaan barang dan jasa dalam perekonomian meningkat. Mengenai perkembangan investasi di Jawa tengah, secara target mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 yang ditargetkan kurang lebih setengah dari target tahun sebelumnya sebagai penyesuaian atas dampak Covid 19. Secara realisasi pun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019, namun memiliki tingkat ketercapaian di atas 200%. Namun, pada tahun 2021 untuk pertama kalinya target investasi di Jawa Tengah tidak mencapai target namun meningkat dari tahun 2020.

Tabel 1 Perkembangan Target dan Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah 2017-2021

Tahun	Target (Rp, Triliun)	Realisasi (Rp, Triliun)		
		PMA	PMDN	Total
2017	41.70	31.67	19.87	51.54
2018	47.15	31.79	27.48	59.27
2019	47.42	40.85	18.65	59.50
2020	24.89	19.64	30.61	50.24
2021	53.53	21.40	31.31	52.71

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Investasi di Jawa Tengah dilihat secara sektoral, sektor Listrik, Gas dan Air merupakan sektor dengan nilai investasi terbesar (45,57%) untuk PMA, disusul investasi di sektor industri Tekstil (22,57%) dan Industri Barang dari Kulit dan Alas kaki (18,18%). Kondisi demikian menunjukkan bahwa sektor energi masih cukup dominan. Sementara itu, investasi terbesar kategori PMDN adalah sektor industri mineral non logam (48,14%), Lainnya (22,72%), dan Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (11,68%)



Gambar 2 Karakteristik Investasi Provinsi Jawa tengah Menurut Sektor

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan wilayah, 5 Kabupaten/Kota penerima investasi terbesar kategori PMA pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang Kabupaten Padi, dan Kabupaten Kendal. Sedangkan 5 Kabupaten/Kota penerima investasi kategori PMDN yaitu Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Wonogiri. Nilai investasi pada Kabupaten/kota penerima PMA dan PMDN secara terperinci disajikan pada tabel 2

PMA	Nilai (US\$. Ribu)	PMDN	Nilai (Rp. Miliar)
Kab. Jepara	144.670,70	Kab. Grobogan	4.018,48
Kab. Tegal	30.653,30	Kt Semarang	862,97
Kab. Rembang	16.405,40	Kab. Cilacap	546,68
Kab. Pati	13.275,30	Kab. Pekalongan	401,40
Kab. Kendal	12.633,00	Kab. Wonogiri	242,89

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Iklim Investasi Provinsi Jawa Tengah dalam Perspektif Investor

Penentuan daerah tujuan investasi yang merupakan keputusan rasional investor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk investasi asing, keputusan investasi diantaranya dipengaruhi oleh Iklim investasi dipengaruhi oleh stabilitas politik, tingkat upah yang lebih rendah, biaya produksi yang lebih rendah, komunikasi yang mudah, nilai tukar yang baik, dan kebijakan negara tuan rumah tentang penanaman modal asing (Haudi, Hadion Wijoyo, 2020). Pemilihan daerah tujuan investasi dipengaruhi oleh ukuran pasar, produktivitas, tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur lokal, risiko negara tuan rumah (politik, ekonomi, keuangan, bencana), upah, peraturan, dan budaya (Adrian Sutawijaya, 2013; Li, X.; Quan, R.; Stoian, M.C.; Azar, 2018). Sejumlah lembaga seperti Forum Ekonomi Dunia (WEF), Bank Dunia (WB), dan Institut Internasional untuk Pengembangan Manajemen (IIMD) juga mengembangkan sejumlah indikator daya saing investasi yang tercerminkan dalam suatu indeks seperti Global Competitiveness Index (GCI) yang dikembangkan oleh WEF. Terdapat 10 indikator yang digunakan dalam kemudahan berbisnis, yaitu kemudahan dalam pengurusan berbagai perizinan usaha, izin untuk mendirikan bangunan usaha, pendaftaran properti, kemudahan

prosedur untuk memperoleh jaringan listrik, pembayaran pajak, akses terhadap kredit/pinjaman, perlindungan bagi pemegang saham minoritas di negara yang bersangkutan, perdagangan lintas batas, penegakan kontrak, biaya dan waktu proses hukum, serta berkontrak dengan pemerintah (IFC, 2017; World Bank Group, 2020).

Salah satu penentu iklim investasi adalah kondisi keamanan dan stabilitas politik. Mengenai hal tersebut, responden dalam penelitian ini cenderung memiliki penilaian bahwa kondisi keamanan, stabilitas politik, dan tipikal penduduk maupun infrastruktur Jawa Tengah kondusif untuk berinvestasi. Sebagian besar investor mempersepsikan bahwa kondisi keamanan, politik, sosial penduduk, dan keterbukaan penduduk terhadap investasi mendukung investasi.

Tabel 3 Persepsi Investor terhadap Keamanan, Sosial-politik, dan Infrastruktur

Indikator	Mendukung	
	Frekuensi	%
Kondisi keamanan di Jawa Tengah	20	95,23
Kondisi Sosial-politik di Jawa Tengah	21	100,00
Kondisi Infrastruktur Jawa Tengah	19	90,47
Keterbukaan penduduk terhadap kehadiran orang asing	16	76,19

Sumber: data primer, diolah 2022.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah yang tercermin pada agregat ekonomi makro PDRB per kapita, tingkat inflasi, upah, dan perpajakan cenderung dipersepsikan mendukung investasi. Tingkat PDRB per kapita mengindikasikan kemampuan masyarakat atau daya beli Jawa Tengah. Artinya, terdapat potensi pasar yang besar jika suatu perusahaan beroperasi dan menargetkan konsumen Jawa Tengah. Pada indikator inflasi, sebagaimana diketahui pola inflasi di Jawa Tengah sama dengan pola inflasi nasional dengan kecenderungan terkendali pada tingkat yang rendah. Dalam 5 tahun terakhir, inflasi Jawa tengah berada pada kisaran 1,5% - 3,61%. Investor juga memiliki persepsi positif terhadap tingkat upah minimum provinsi (UMP). Sebanyak 95,23 persen menyatakan UMP sebagai faktor pendukung investasi. Hal ini memang salah satu daya tarik kebanyakan investor yang akan berinvestasi di Jawa Tengah. Demikian juga persepsi investor terkait dengan penerapan pajak. Meskipun tidak sebaik penilaian terhadap indikator makro

lainnya, sebanyak 71,43 persen responden masih menyatakan bahwa perpajakan di Jawa Tengah mendukung investasi. Menurut investor kondisi perpajakan di Indonesia kurang menarik jika dibandingkan Vietnam dan Cina pemerintah telah memberikan insentif pajak bagi investor.

Tabel 4 Persepsi Investor terhadap Kondisi Ekonomi Makro

Indikator	Mendukung	
	Frekuensi	%
PDRB per kapita	17	80,95
Tingkat inflasi	19	90,48
Tingkat UMP yang berlaku	20	95,23
Perpajakan	15	71,43

Sumber: data primer, diolah 2022.

Dalam perspektif investor, Jawa Tengah memiliki peluang pasar akan hasil produksi yang baik. Hal tersebut tercermin pada penilaian investor terhadap jumlah penduduk, daya beli penduduk, permintaan domestik, serta permintaan ekspor. Persepsi responden terhadap peluang pasar secara terperinci disajikan pada tabel ...

Tabel 5 Persepsi Investor terhadap Peluang Pasar

Faktor	Mendukung	
	Frekuensi	%
Jumlah Penduduk Jawa Tengah	21	100
Daya beli Penduduk Jawa Tengah	16	76,20
Kondisi permintaan di Indonesia	18	85,71
Kondisi permintaan di Pasar Ekspor	19	90,48

Sumber: data primer, diolah 2022.

Pada faktor perijinan yang mencakup pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), implementasi online single submission (OSS), persyaratan, pelayanan aparat, kepastian waktu, dan kepastian biaya perijinan. Di tingkat nasional, faktor perijinan ini merupakan kelemahan Indonesia dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, dimana proses dan prosedur perijinan investasinya sudah sangat efisien dan sangat memudahkan investor. Kondisi perizinan di Jawa Tengah

cenderung dipersepsikan mendukung investasi, baik terkait PTSP, OSS, persyaratan, pelayanan aparat, kepastian waktu, dan kepastian biaya perijinan.

Tabel 6 Persepsi Investor terhadap Proses Perijinan

Faktor	Mendukung	
	Frekuensi	%
Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)	17	80.95
Implementasi online single submission (OSS)	19	90.48
Persyaratan	18	85.71
Pelayanan aparat dalam proses perijinan	20	95.24
Kepastian waktu	21	100.00
Kepastian biaya	21	100.00

Sumber: data primer, diolah 2022.

Kondisi Faktor risiko politik.

Faktor risiko sebagai faktor yang mempengaruhi investasi cenderung sulit diamati namun dapat dirasakan. Untuk mengetahui kondisi faktor risiko politik secara mendalam peneliti melakukan wawancara investor yang merupakan anggota asosiasi pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Para narasumber membedakan risiko politik ke dalam faktor risiko politik secara nasional dan kedaerahan risiko politik nasional tidak dapat digeneralisasi pada level daerah. Risiko politik nasional akan ditanggapi secara berbeda oleh masing-masing daerah berdasar karakteristik masing-masing daerah. Berikut ini adalah pernyataan narasumber terkait pentingnya risiko politik dalam keputusan investasi:

“Politik tentu sangat dipertimbangkan saat memilih daerah tujuan investasi. Risiko politik di tingkat daerah sangat diwarnai oleh kondisi politik nasional. Secara kedaerahan, kadar risiko akan sangat berbeda untuk daerah yang satu

dengan yang lain. Tidak dapat digeneralisasi karena respon terhadap kondisi politik sangat dipengaruhi oleh karakter daerah. Setiap daerah punya karakter berbeda yang tidak dapat digeneralisasi.”

Lebih lanjut, narasumber dalam pendapatnya menyiratkan bahwa risiko politik Jawa Tengah relatif rendah karena karakter masyarakat Jawa Tengah yang cenderung memiliki karakter yang santai atau lemah lembut.

“Untuk provinsi Jawa Tengah, risiko politik relatif rendah karena sifat orang Jateng yang slow (lemah lembut, tenang). Orang Jawa tengah kan istilahnya cenderung “nrimo ing pandum” (sikap menerima dan pasrah atas situasi tertentu, menerima sesuai yang sudah diberikan). Sebagai contoh, ini kan ...tahun 2024 ada pemilu Presiden, di daerah lain mungkin sudah panas atau heboh tetapi orang Jawa Tengah masih kalem, tidak banyak demo-demo.”

Dalam pandangan para narasumber, faktor risiko nasional lebih berpengaruh terhadap keputusan investasi karena karena berdampak masif pada seluruh kebijakan investasi asing. Mengenai pemilihan daerah tujuan investasi, investor hanya akan menerima rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), meskipun ia tetap memiliki kehendak bebas menentukan lokasi investasi. Dengan kata lain faktor faktor risiko regional sifatnya mengikuti kondisi pusat.

“Namun sekali lagi, politik pusat sangat berpengaruh. Sebagai contoh, jika dikaitkan dengan pilkada serentak (dari Presiden sd Gubernur/Bupati-Wali kota,) WAIT N SEE investor akan sangat kuat, karena siapa yang akan menjadi presiden lebih menjadi dipertimbangan dalam memutuskan investasi. Bahkan, ketika Presiden terpilih telah ditetapkan, investor masih akan menunggu pembentukan kabinet.

Ketika berbicara khusus mengenai PMA, di daerah hanya menerima alokasi PMA dari pusat. PMA akan melewati BKPM dan BKPM yang akan mengarahkan investor tersebut ke provinsi mana.”

Saat ini, risiko politik nasional dapat dilihat dari berbagai kebijakan telah dibuat. Penolakan pemberlakuan RUU Cipta Kerja di berbagai daerah menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Hal ini mendorong buruh melalui serikat pekerja

untuk turun ke jalan menyalurkan aspirasi mereka sehingga produktivitas perusahaan menjadi terkendala. RUU Cipta Kerja ini dianggap menguntungkan pengusaha mulai dari penggunaan *activity-based* sebagai dasar pengupahan menggantikan Upah Minimum, kemudahan pemberhentian sepihak dan lain sebagainya,

“(Persepsi risiko investor asing) ditentukan komitmen pemerintah yang tercermin pada bagaimana pemerintahan Provinsi Jateng menyikapi kebijakan pemerintah pusat dan menyesuaikannya dengan budaya atau culture penduduk Jateng.”

“Pengaruh politik tingkat pusat juga dapat dilihat dalam kasus OMNIBUS LAW. Pemerintah sepertinya senang membuat wacana, dilempar ke masyarakat tetapi tidak siap dengan berbagai macam respon yang justru meningkatkan ketidakpastian. Wacana sepertinya untuk mengukur respon masyarakat saja. atau cek ombak saja”

Investor cenderung menilai bahwa pemerintah memiliki komitmen politik yang tinggi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif. Karena merebaknya wabah Covid-19, secara umum, investasi mengalami perlambatan. Pemerintah sangat responsif dalam menangani pandemi ini agar laju perlambatan investasi dapat ditahan.

“Komitmen politik tercermin pada bagaimana menangani Covid sebagai bagian dari penciptaan iklim investasi kondusif. Investasi dipastikan melambat, pertumbuhan ekonomi pasti melambat karena selama ini investasi menyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi”

“....Pemerintah Jawa tengah membuat sebuah kebijakan yang cepat dan tepat terhadap iklim investasi, kepastian hukum dan juga kebijakan pemerintah akan sangat berupaya mempengaruhi iklim investasi ke arah yang semakin ramah terhadap investor”.

Penentuan Faktor Kunci Sukses Meningkatkan Daya Saing Jawa Tengah sebagai daerah Tujuan Investasi

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid 19, kehadiran investasi oleh sektor swasta semakin dibutuhkan karena banyak sumberdaya termasuk anggaran yang dialokasikan dalam upaya pencegahan COVID-19 dan dampak negatifnya. Kondisi fiskal semakin terbatas. Oleh karena itu, pemerintah unit harus secara akurat dan efektif meningkatkan iklim investasi.

Iklim investasi di Jawa Tengah pada semua aspek dipersepsikan baik, dalam arti mendukung investasi. Namun demikian, kajian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dianggap sebagai permasalahan mendasar untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa permasalahan mendasar terkait dengan menjadikan Jawa tengah sebagai daerah tujuan investasi antara lain (1) Ketersediaan lahan. Investor sering mengalami hambatan dalam pengadaan lahan karena tidak sesuainya lahan yang diinginkan investor dengan peruntukannya serta masalah sulitnya pembebasan lahan. (2). Tenaga kerja yang dibutuhkan sangat sulit didapat karena tenaga kerja lokal kebanyakan tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Tuntutan kompetensi yang didukung sertifikat kompetensi juga membuat perusahaan sering tidak dapat menerima karyawan yang belum tersertifikasi, (3) Persebaran investasi yang kurang merata antar kabupaten kota, (4) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), yang kurang sesuai lagi dengan kondisi terutama terkait dengan kebutuhan lahan hijau dengan kawasan peruntukan industri, dan (5) Pelabuhan tidak memadai, rob dan dangkal sehingga untuk mendatangkan barang menjadi sangat tinggi biayanya.

Bertitik Tolak dari persepsi investor terhadap iklim investasi di Jawa Tengah yang kondusif serta berbagai permasalahan mendasar yang menyertainya, dapat dirumuskan beberapa faktor kunci sukses meningkatkan daya saing daerah sebagai daerah tujuan investasi. “Jawa Tengah Ladang Investasi tahun 2025’ tidak hanya berhenti pada slogan saja, namun dapat diwujudkan. Beberapa faktor kunci sukses tersebut antara lain: (1) mempertahankan kondisi faktor-faktor ekosistem investasi seperti keamanan sosial-politik, konsistensi penerapan regulasi, dan sikap masyarakat dan aparat yang *well-investment*, (2) Berani membuka kantung-investasi baru dengan promosi yang masif. (Kendal sudah, Batang sedang berproses), bagaimana dengan daerah lain?, (3) Menjaga tingkat upah yang kompetitif sehingga dapat bersaing terutama dengan provinsi-provinsi terdekat, (4)

Ketekunan untuk *roadshow* secara simultan dan konsisten baik ke para investor dalam negeri maupun luar negeri. Delegasi perlu dibekali dengan kemampuan diplomasi pemasaran, fasilitas pemasaran seperti buklet, leaflet, buku-buku, video, juga penawaran realitas dengan berbagai platform teknologi informasi, dan (5) Memperbaiki infrastruktur dan akses ke pelabuhan serta mengoptimalkan pelabuhan yang sudah ada, misal mengefektifkan pelabuhan Kendal namun perlu diperdalam.

Selain beberapa hal tersebut, terdapat catatan dari investor mengenai faktor kunci sukses menjadikan Jawa tengah sebagai daerah tujuan investasi, yaitu (1) Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan energi terutama gas, karena minyak mahal. Gas merupakan sumberdaya yang dimiliki daerah dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. Hal ini juga bertujuan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa tengah juga memiliki daya saing yang tinggi dengan menekan Harga Pokok Produksi (HPP), (2) mengaplikasikan konsep-konsep memasarkan daerah secara kreatif dan komprehensif dengan membentuk tim kreatif yang terdiri dari berbagai unsur seperti pakar ekonomi, sosial, politik, dan media, (3) Daerah harus secara kreatif menemukan sesuatu yang baru, menemukan “faktor pembeda”, dan mampu menciptakan pasar dengan memahami apa yang sesungguhnya diinginkan dan karakter investor, (4) Pemerintah daerah perlu berpikir sebagai investor yang berani mengambil risiko karena biayanya risiko berbanding lurus dengan keuntungan/hasil, (5) OPD terkait investasi hendaknya mampu melepaskan ego sektoral karena masalah investasi tidak hanya tanggung jawab DPMPTSP juga meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota karena banyak kewenangan berada di kabupaten/kota, (6) tetap memberikan perhatian pada kawasan industri yang bukan merupakan kawasan strategis nasional, (6) Otoritas investasi provinsi perlu memiliki "intelijen investasi" di provinsi lain untuk mendalami apa yang sebetulnya dibutuhkan Jateng sekarang ini agar secara relatif memiliki keunggulan dibanding provinsi lain, dan (7) menyusun basis data dan mengolahnya agar menjadi sajian informatif para pelaku ekonomi

4. Penutup

Kesimpulan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dipersepsikan kondusif sebagai daerah tujuan investasi, baik terkait dengan Iklim investasi maupun risiko politik. Namun demikian, sejumlah persoalan yang dirasakan menghambat realisasi penanaman modal masih cukup banyak ditemui. Dari beberapa masalah yang cenderung dianggap mendasar untuk berinvestasi di Jawa Tengah antara lain:

1. Ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan.
2. Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
3. Kondisi *clean and clear* terkait peruntukan lahan industri dengan kebutuhan lahan untuk ruang hijau dan lahan sawah dilindungi (LSD)
4. Pelabuhan Tanjung Mas tidak memadai, rob dan dangkal sehingga untuk mendatangkan barang menjadi sangat tinggi biayanya.

Bertitiktolak dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi dibutuhkan syarat perlu (*necessary condition*) dan syarat cukup (*sufficient condition*). Terpenuhinya (*necessary condition*) dan syarat cukup (*sufficient condition*) tersebut akan menjadi faktor kunci sukses meningkatkan daya saing Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi.

Syarat perlu (*necessary condition*) sebagai daerah tujuan investasi adalah:

1. Iklim investasi yang kondusif dengan
2. Risiko politik yang rendah.

Untuk syarat perlu tersebut, Jawa Tengah dapat dikatakan telah memenuhinya. Sementara itu, memiliki keunggulan dalam daya saing dan menjadi pilihan daerah tujuan, Jawa Tengah harus melengkapi syarat cukup (*sufficient condition*)nya. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa syarat cukup (*sufficient condition*)nya, antara lain:

1. Jaminan ketersediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan (luasan dan peruntukan). Termasuk dalam hal ini adalah fasilitasi pembebasan lahan.

2. Jaminan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dalam arti kuantitas maupun kualitas.
3. Jaminan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang pro investasi untuk mengkondisikan *clean and clear* nya pengadaan lahan karena peruntukan lahan yang sering berbenturan kebutuhan ruang hijau dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
4. Pengembangan fasilitas pelabuhan yang memadai

Saran

1. Evaluasi terhadap Rencana tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang segera diselesaikan agar memberi kepastian kepada investor. Kondisi *clen and Clear* terkait dengan pengadaan lahan harus diciptakan
2. Kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan Kabupaten/Kota karena banyak kewenangan yang berada di kabupaten/Kota. Daerah juga merupakan pihak yang paling tahu mengenai kondisi ketenagakerjaan di wilayahnya. Antar Kabupaten/kota diarahkan untuk tidak saling mendominasi, tetapi bersinergi yang secara keseluruhan akan berada dalam satu wadah “Jateng Incorporated”
3. Mengaplikasikan konsep-konsep memasarkan daerah secara kreatif dan komprehensif dengan membentuk tim kreatif yang terdiri dari berbagai unsur seperti pakar ekonomi, sosial, politik, dan media serta memiliki “investment intelligent” serta menyusun basis data dan mengolahnya agar menjadi sajian informatif para pelaku ekonomi
4. Mengkondisikan infrastruktur Pelabuhan agar memadai untuk mendukung mobilitas sumberdaya.
5. Mengelola daerah sebagai daerah tujuan investasi dari sudut pandang bisnis dalam arti berani mengambil risiko, mempromosikan, dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pasar serta menciptakan “faktor pembeda”

Referensi

Adrian Sutawijaya, Z. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia. *Trikonomika*, 12, 32–39.

- Busse, M., & Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. *European Journal of Political Economy*.
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.02.003>
- Harms, P., & Ursprung, H. W. (2002). Do civil and political repression really boost foreign direct investments? *Economic Inquiry*.
<https://doi.org/10.1093/ei/40.4.651>
- Haudi , Hadion Wijoyo, Y. C. (2020). Analysis of Most Influential Factors to Attract Foreign Direct Investment. *Journal of Critical Reviews*, 7(13), 4128–4135.
- IFC, T. W. B. (2017). Doing Business: Measuring Business regulations. In *ISBN*.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0948-4>
- Li, X.; Quan, R.; Stoian, M.C.; Azar, G. (2018). Do MNEs from developed and emerging economies differ in their location choice of FDI? *International Business Review*, 27, 1089–1103.
- World Bank Group. (2020). *Doing Business 2020*.